

## # 8

# Mencacah Angka, Menarasikan Realitas: Memotret Realitas Kelindan Regsosek dan Masyarakat di Pulau Ternate

*Lukman Nul Hakim & Reza Amarta Prayoga*

## A. Menghayati Regsosek di Kota Ternate Maluku Utara

Pada bulan Oktober–November 2022, bangsa Indonesia mempunyai hajat besar, yaitu berupa kegiatan mendata seluruh penduduk Indonesia di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Secara konten, pendataan ini bertujuan memetakan jumlah penduduk, pekerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, dan keberdayaan secara ekonomi. Kajian ini berupaya melihat secara lebih dekat kegiatan yang sangat masif ini dari pintu ke pintu yang dilalui petugas lapangan. Kajian ini mencoba merekam euforia masyarakat yang menjadi responden pendataan dan suka duka petugas-petugas garda terdepan kegiatan Regsosek.

---

L. N. Hakim & R. A. Prayoga

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, e-mail: lukm011@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Hakim, L. N. & Prayoga, R. A. (2023). Mencacah angka, menarasikan realitas: memotret realitas kelindan regsosek dan masyarakat di Pulau Ternate. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (301–344). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c701 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Secara demografi, hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa per 30 Juni 2021 jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara sebanyak 1,32 juta jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 981,12 ribu jiwa (74,38%) beragama Islam, 328,858 jiwa beragama Kristen, 6.606 beragama Katolik, 113 jiwa beragama Hindu, 139 jiwa beragama Budha, 112 Konghucu, dan 10 orang lainnya menganut aliran kepercayaan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak (674,14 ribu) dibanding penduduk perempuan (642,87) (Kusnandar, 2021). Selain penelusuran literatur, data digali melalui *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan terkait Regsosek di Kota Ternate.

Bapak Aidil Adha (Kepala BPS Provinsi Maluku Utara) dalam FGD menjelaskan bahwa garda terdepan pelaksanaan Regsosek adalah para petugas pendataan lapangan (PPL). PPL bertugas mendata profil penduduk dari rumah ke rumah. Setiap PPL memiliki beban tugas mendata sekitar 250 kepala keluarga. Menurut Bapak Harim Arrosid, BPS Kota Ternate mengerahkan sebanyak 224 PPL, 58 PML, dan 11 Koseka. Petugas PPL biasanya direkrut dari sekitar wilayah yang akan didata untuk memudahkan proses pendataan. Petugas yang berasal dari wilayahnya sendiri mempunyai keunggulan dalam pengetahuan peta wilayah, memahami kondisi sosial masyarakat, dan bahkan sudah mengenal banyak warga di sekitar lokasi tersebut. PPL juga disupervisi oleh seorang petugas pemeriksaan lapangan (PML) untuk memastikan kualitas output kinerjanya. PML kemudian akan disupervisi oleh koordinator sensus kecamatan (Koseka) yang bertanggung jawab untuk tingkat kecamatan.

Kegiatan Regsosek di Kota Ternate melibatkan 224 PPL, 58 PML, dan 11 Koseka. Proses pemilihan petugas, baik itu untuk PPL maupun PML, dilakukan melalui seleksi yang ketat. Latar belakang PPL sangat beragam, di antaranya mahasiswa, pegawai kelurahan, ibu rumah tangga, tukang ojek, dan lain-lain. Kemudian, terkait pemilihan PML, umumnya merupakan mitra kerja BPS yang sudah lebih berpengalaman, yaitu orang-orang yang sebelumnya terlibat di kegiatan pengambilan data ataupun sensus BPS dengan latar belakang yang juga beragam. PML ada yang berprofesi sebagai tenaga honorer



Sumber: BPS Kota Ternate (2022)

**Gambar 8.1** Pengumuman Rekrutmen Mitra Pendataan Regsosek

di kelurahan, ibu guru taman kanak-kanak, ataupun ibu rumah tangga yang merupakan aktivis sosial kemasyarakatan.

Untuk merekrut petugas PPL dan PML, BPS Kota Ternate membuat pengumuman melalui *website* BPS Kota Ternate dan melalui media sosial, seperti Facebook ataupun Instagram (Gambar 8.1). Pengumuman rekrutmen tersebut dimulai pada tanggal 1 September 2022. Proses rekrutmen dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kegiatan skrining awal dan kemudian dilakukan tes wawancara.

Menurut Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, tes wawancara sangat penting untuk mengetahui kemampuan komunikasi pelamar karena kemampuan komunikasi adalah kriteria utama dan merupakan modal penting dalam menjalankan tugas mendata di lapangan. Kriteria penting lainnya adalah ketelitian. Petugas harus teliti memeriksa keabsahan data-data yang digunakan untuk melamar. Kriteria selanjutnya adalah mengetahui lokasi tinggal calon petugas agar petugas ditempatkan di wilayah yang telah dikenalnya.

Pengumuman final hasil seleksi di Kota Ternate dilakukan pada 1 Oktober 2022 (Gambar 8.2). Komposisi PML dan PPL hasil seleksi seperti dapat dilihat di Tabel 8.1. Kecamatan dengan jumlah petugas terbanyak adalah Ternate Selatan dengan 17 orang PML dan 67 orang PPL, sedangkan kecamatan dengan jumlah petugas paling sedikit adalah Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Hiri, masing-masing



Sumber: BPS Kota Ternate (2022)

**Gambar 8.2** Hasil Seleksi Calon Petugas Regsosek BPS Kota Ternate

**Tabel 8.1** Hasil Seleksi Final Petugas PML dan PPL Kota Ternate

KECAMATAN	Sebaran Petugas	
	PML	PPL
Pulau Ternate	2	11
Moti	1	7
Batang Dua	1	5
Hiri	1	5
Ternate Barat	2	11
Ternate Selatan	17	67
Ternate Tengah	13	51
Ternate Utara	11	62

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

dengan satu orang PML dan lima orang PPL. Kedua kecamatan tersebut berada di sebuah pulau kecil yang terpisah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, proses kerja kegiatan Regsosek dimulai dengan petugas Regsosek meminta izin kepada ketua/pengurus satuan lingkungan setempat (SLS) dan mengenali wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, ketua/pengurus SLS melakukan identifikasi awal status kesejahteraan keluarga di lingkungannya. Selanjutnya, petugas Regsosek akan mendatangi satu per satu rumah di RT tersebut untuk melakukan wawancara dan *geotagging* lokasi keluarga. Dalam pelaksanaan wawancara, petugas PPL telah dibekali dengan satu lembar kuesioner yang berisi empat halaman. Kuesioner tersebut telah didesain sedemikian rupa oleh BPS pusat sehingga terlihat ringkas agar responden tidak merasa terbebani dengan jumlah halaman yang banyak.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa dalam satu rumah dapat terdiri dari beberapa kepala keluarga. Petugas PPL harus memastikan setiap keluarga terdokumentasi dalam satu lembar kuesioner. Petugas PPL bertugas mengidentifikasi apakah keluarga di rumah tersebut masuk dalam kategori tidak miskin, miskin, atau sangat miskin. Ketika petugas menilai bahwa keluarga tersebut masuk kategori miskin atau sangat miskin maka petugas harus memberikan bukti (*evidence*) berupa foto pada empat bagian dari rumah tersebut, yaitu bagian dinding, lantai, atap, dan kamar mandi. Foto-foto tersebut kemudian di upload ke aplikasi Wilkerstat (Gambar 8.3), sebuah aplikasi berbasis android yang dibuat khusus untuk lingkungan kerja BPS. Aplikasi ini berfungsi untuk mengenali batas wilayah kerja statistik (Wilkerstat) dan untuk melakukan pengambilan *geotagging* foto suatu *landmark* batas Wilkerstat maupun *landmark* infrastruktur.

Aplikasi ini menjadi saluran validasi data untuk mengetahui secara riil potret kemiskinan di masyarakat. Gambar-gambar yang diunggah oleh petugas PPL menjadi pembuka informasi sah realitas kondisi di masyarakat. Gambar-gambar itu menjadi bukti apakah sebuah keluarga yang menjadi responden masuk kategori tidak miskin, miskin atau sangat miskin. Kondisi rumah tinggal menjadi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

**Gambar 8.3** Aplikasi Wilkerstat

aset nyata keluarga miskin, terlebih kepemilikan rumah ini berstatus sewa/kontrak, numpang, atau milik sendiri juga menjadi penguat bahwa keluarga tersebut masuk dalam kategori tersebut. Sherraden (2006) dalam ulasannya menguatkan bahwa rumah menjadi bagian dari aset nyata (*tangible aset*) yang disebutkannya sebagai properti nyata (bangunan atau tanah). Rumah menjadi aset penopang inti kehidupan yang paling dasar harus dipenuhi, selain pangan dan sandang (Jayaputra, 2017; Prayoga, 2021). Regsosek melalui bantuan perangkat lunak *Wilkerstat* dapat menghimpun informasi kondisi kemiskinan berbasis bukti foto.

Dengan metode verifikasi yang lebih baik ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang riil atas kondisi di masyarakat. Dengan data yang valid maka diharapkan negara mempunyai gambaran yang sesungguhnya mengenai kondisi masyarakat. Informasi yang akurat akan mendukung pemberian bantuan yang tepat sasaran. Informasi dari *Wilkerstat* pada Regsosek ini menjadi alat triangulasi lapangan, selain informasi lain dari ketua RT untuk mengecek kondisi kemiskinan.

## **B. Menyisir Bentang Alam Ternate: Dari Kasturian hingga Pulau Hiri**

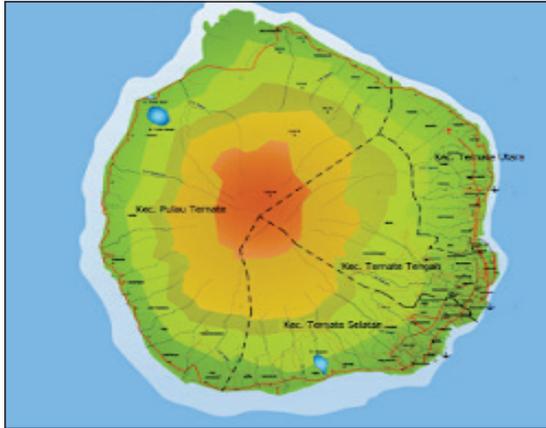
Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 telah menetapkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia. Alam

Kota Ternate menyuguhkan pesona perpaduan birunya laut, hijaunya gunung, dan pulau-pulau yang indah. Laut dan pantai terlihat bersih. Hebatnya, pantai tempat berenang itu berada di sisi jalan raya yang trotoarnya lebar dan juga bersih. Selain laut, terbentang hamparan pemandangan hijau dari sebuah gunung yang nampak gagah. Sungguh, di Ternate ke manapun arah pandangan dihadapkan, di sana terlihat keindahan. Sebuah mahakarya alam semesta ciptaan Yang Maha Kuasa. Seluruh pemandangan dan tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara telah bekerja sama dengan sempurna untuk membuat orang yang tinggal di atasnya merasa bahagia.

Pulau Ternate mempunyai luas 111,80 km<sup>2</sup> (BPS Kota Ternate, 2016). Gambaran geografis peta Kota Ternate dapat dilihat pada Gambar 8.4. Panjang keliling pulau sekitar 55 km (Katherina, 2021). Jarak ini menunjukkan tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk mengelilingi pulau Ternate. Jika ingin mengelilingi pulau ini dengan sepeda, hanya membutuhkan setengah hari, atau sekitar 3,6 jam jika kecepatan sepedanya adalah 15 km/jam. Namun, temperatur udara di Ternate cukup panas, yaitu sekitar 39°, kelembapan udara sebesar 76%, dan kecepatan angin 5 km/jam. Matahari mulai menyengat sejak pukul 9 pagi. Hal ini wajar mengingat lokasinya dikelilingi lautan sehingga cahaya matahari langsung masuk tanpa hambatan.

Masyarakat Pulau Ternate mempunyai dua istilah untuk menunjuk jalan, yaitu *kelao'* dan *kedara*. *Kelao'* merujuk pada ke arah laut. Sementara itu, *kedara* merujuk pada ke arah gunung (daratan).

Bentang alam Pulau Ternate memperlihatkan ragam perkebunan cengkeh, kopra, pala, dan kakao. Komoditas perkebunan yang telah menjadi andalan Pulau Ternate sejak dahulu kala. Komoditas perkebunan yang telah menarik bangsa Eropa berdatangan untuk berdagang dengan petani Pulau Ternate, yang kemudian berlanjut dengan keinginan bangsa Eropa tersebut untuk memonopoli perdagangan. Beberapa negara Eropa yang tercatat dalam sejarah mengunjungi Pulau Ternate adalah Spanyol, Portugis, dan Belanda. Jejak kehadiran bangsa Eropa dapat dilihat dari benteng-benteng yang didirikan. Terdapat sekitar 15 benteng Eropa dengan berbagai



Sumber: Peta kota (2017)

**Gambar 8.4** Pulau Ternate

variasi bentuk dan ukuran di Pulau Ternate, akan tetapi yang masih bisa dinikmati kondisinya tinggal tujuh benteng (Iriyanto, 2010). Kesohoran Ternate yang dikenal sebagai pulau rempah karena hasilnya yang berlimpah menjadikan Ternate dulu sebagai basis benteng dagang bagi VOC Belanda dan Portugis (Harkantiningasih, 2014; Stefanus & Koestoro, 2018).

Ternate saat ini juga dikenal sebagai pusat aktivitas kegiatan jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara Kawasan Indonesia Timur. Trajektori historis Ternate sebagai pulau rempah, masih tersohor dan melekat sebagai *the spicy island* (kota rempah) (Kota rempah jadi, 2022). Selain itu, Ternate memiliki *branding* sebagai kota “Bahari Berkesan”. Hal ini bermakna kota yang menyelaraskan 6 (enam) entitas, yakni berbudaya, agamis, harmonis, mandiri, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (Bappeda Kota Ternate, 2016).

Bappeda Kota Ternate (2016) juga menyebutkan ada tujuh kecamatan dan 77 kelurahan. Tujuh kecamatan ini meliputi Ternate Selatan, Ternate Utara, Ternate Tengah, Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri. Kontur topografi Ternate sebagian besar daerah bergunung dan berbukit, yang terdiri dari pulau vulkanis dan karang. Ciri Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan, lima

di antaranya didiami penduduk (Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Tifure), sedangkan tiga pulau yang berukuran kecil tidak dihuni (Pulau Maka, Mano, dan Gurida).

Ternate menjadi pilihan dalam penggalian emik dari proses Regsosek tahun 2022. Ada beberapa pertimbangan dipilihnya Ternate menjadi lokus penggalian emik Regsosek. Pemilihan ini didasarkan secara *purposive* mengikuti penjelasan Creswell (2014) disertai pertimbangan melalui penggalian kepustakaan berupa hasil kajian terdahulu. Berikut delapan pertimbangan Ternate menjadi lokus penggalian emik proses Regsosek, yakni (1) daerah rawan miskin akibat migrasi dan pertambangan (Andjarwati & Kusumartono, 2019; Syahrain, 2019), (2) pernah terjadi konflik komunal horizontal (etnik-agama) (Rozi, 2006; Sadjim dkk., 2016), (3) karakter masyarakat yang majemuk (Irsyadi, 2015), (4) involusi politik pemekaran (Qodi, 2012), (5) etnisitas dan agama menjadi potensi segregasi sosial (Jati, 2013), (6) anomali tensi politis tingkat elite lokal (Hasim dkk., 2019; Umar, 2019), dan (7) daerah rawan bencana gempa, gunung api, dan tsunami (Djalil dkk., 2015; Sarihi dkk., 2022). Meskipun demikian, dengan beberapa kriteria yang bersifat ancaman tersebut, Provinsi Maluku Utara meraih peringkat pertama dalam indeks kebahagiaan, hal ini menjadi alasan kedelapan (8). Delapan pertimbangan ini menjadi justifikasi yang menarik dasar *purposive* lokus Ternate untuk dokumentasi penggalian emik proses Regsosek 2022 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam upaya mendapatkan gambaran atas pelaksanaan Regsosek di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tim peneliti mendampingi petugas PPL ke beberapa kelurahan, yaitu Kasturian, Foramadiah, dan Pulau Hiri.

### **Kasturian: Peri Urban Ternate di Gunung Gamalama**

Kasturian merupakan kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Ternate Utara. Masyarakat di pinggiran pantai sering kali menyebut arah letak kelurahan tersebut dengan *kedara* (arah gunung). Kasturian ini memang terletak di kaki Gunung Gamalama. Kontur yang mendaki menjadi tantangan tersendiri untuk menuju ke Kelurahan

Kasturian. Kelurahan ini menjadi salah satu destinasi pengambilan data Regsosek. Setidaknya ada empat PPL yang bertanggung jawab penuh atas penghimpunan data Regsosek di wilayah ini. Kelurahan ini menjadi sampel penggalan proses emik Regsosek.

Wilayahnya yang menanjak tinggi mengakibatkan tidak semua rumah di wilayah tersebut dapat dialiri pipa PDAM sehingga sebagian dari masyarakat di sana masih mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Mata pencarian masyarakat di Kasturian bervariasi, mulai dari petani pala dan sayuran, tukang ojek, ASN, tentara, pedagang, hingga honorer. Kelurahan ini juga tidak terlalu jauh dari pusat Kota Ternate, hanya berjarak sekitar 2,8 km dari bibir pantai dan kantor Wali Kota Ternate. Nilai jual tanah dan bangunan yang tinggi di sekitar pinggiran pantai Kota Ternate membuat Kasturian menjadi pilihan tempat bermukim bagi sebagian masyarakat di peri Kota Ternate. Wilayah yang agak ke dataran tinggi (kaki Gunung Gamalama) mengakibatkan masih banyak tersedia harga tanah dan bangunan yang lebih terjangkau bagi masyarakat pinggiran Kota Ternate.



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.5** Kondisi Permukiman di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara

Dalam kegiatan Regsosek, jalur yang mendaki menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas PPL dan PML yang bertugas di Kelurahan Kasturian ini. Dataran yang tinggi dan menanjak serta permukiman penduduk yang cukup padat dan berundak membuat Kasturian menjadi lokasi yang membutuhkan tenaga ekstra untuk dilewati seperti yang terlihat pada Gambar 8.5. Tantangan pencacahan di sana tidak hanya dari kontur lokasi saja, tetapi juga masyarakatnya. Di siang hari kebanyakan rumah-rumah hanya dapat ditemui dalam kondisi kosong. Masyarakat sangat sulit ditemui untuk didata di rumah saat jam kerja. Pengambilan data Regsosek yang dilakukan oleh PPL biasanya hanya dapat dilakukan pada malam hari.

### **Foramadiahi: Sakralitas Makam Sultan Babullah**

Kelurahan ini berada tepat di selatan kaki Gunung Gamalama Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kontur geografis yang menanjak dan dataran tinggi di kelurahan ini juga menjadikan wilayah ini sulit diakses air bersih. Permukiman di Kelurahan Foramadiahi berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di sana masih banyak mengandalkan berkah alam berupa air hujan untuk konsumsi.

Kelurahan ini merupakan lokasi makam Sultan Babullah (meninggal pada tahun 1583) tergambarkan melalui Gambar 8.6, yang namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Ternate. Lokasi sekitar makam merupakan tempat yang asri sekaligus terasa nuansa sakral yang ketat. Makam ini dikeramatkan bagi Kesultanan Ternate dan masyarakatnya, untuk menuju kesana melewati bukit yang cukup terjal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). *Jere Foramadiahi* merupakan makam keramat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk ritual ziarah makam Sultan Babullah, Sultan Ternate ke-24, yang berada di lembah lebih tinggi ke arah pegunungan Gamalama (La Hade dkk., 2021). Pergi ke lokasi makam tersebut harus melewati rimba pepohonan pala dan cengkik, seakan menjadi bukti yang dapat merasakan glorifikasi historis Ternate sebagai sentral rempah dunia. Lokasi jalan yang ditelusuri terlihat berbukit dengan pemandangan Gunung Gamalama sesuai Gambar 8.7.



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.6** Potret Makam Sultan Ternate, Babullah, di Foramadiahi



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.7** Jalan menjulang terjal eksotisme hamparan indah dari selatan Gunung Gamalama.

## Pulau Hiri: Redupnya Gemerlap Wisata Bahari di Hiri

Togolobe adalah sebuah kelurahan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Pulau Hiri. Akses menuju ke Pulau Hiri hanya bisa dilalui laut, menggunakan *speedboat* penyeberangan memakan waktu selama 25 menit dari Dermaga Sulamadaha. Pulau Hiri sendiri terletak terpisah dari Pulau Ternate. Luas pulau ini mencapai 12,40 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 2.957 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 2022; BPS Kota Ternate, 2016). Suhu terik di siang hari bisa mencapai 39°C. Berlokasi tidak terlalu jauh dari Kota Ternate, Pulau Hiri dengan hamparan khas pulau yang memiliki juluran Gunung Hiri. Kepulauan di Ternate memiliki keunikan sendiri, setiap pulau memiliki gunung yang menjulang tinggi di tengah pulau tersebut.

Panas dan cuaca terik di Pulau Hiri ini bisa dimaklumi dengan keindahan bentangan pantai pasir putih, air laut yang jernih yang berwarna biru (Gambar 8.8), kumpulan koral karang yang terjaga, dan keramahan masyarakatnya yang khas dengan senyuman. Di balik keindahan pulau Hiri, menyisipkan kepiluan dari masyarakatnya. Pulau dengan julukan “Kampung Bahari Nusantara” dan memiliki pelbagai potensi destinasi wisata bahari menghadapi kesulitan akibat hantaman



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.8** Perjalanan menuju Pulau Hiri yang dihiasi hamparan biru laut

pandemi COVID-19 yang menggerus pendapatan masyarakat. Wisata menjadi tulang punggung penghasilan kebanyakan warga di Pulau Hiri, selain nelayan, tukang ojek, dan petani. Kedatangan pelancong yang minim jumlahnya menunjukkan kondisi pulau yang sepi. Para tukang ojek berebut menawarkan tumpangan (berkerumun seperti semut yang mendekati gula) ke wisatawan luar pulau yang dianggap sebagai oase di tengah kelesuan wisata di pulau itu.



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.9** Pesona Tebing Karang Gurabala di Pantai Tomajiko, Pulau Hiri Ternate

### **C. Proses Bisnis Regsosek di Ternate: *Badata yang tra tadata***

Kemiskinan dan anak jalanan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan masalah klasik di perkotaan, tidak terkecuali di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Kota Kesultanan yang kental akan kultur, adat, dan religiositasnya ternyata masih tetap terjebak pada masalah klasik tersebut. Padahal, dinukil dari media populis nasional Kompas, Provinsi Maluku Utara termasuk provinsi paling bahagia di Indonesia, dengan indeks kebahagiaan yang mencapai angka 76,34 (Setyaningrum, 2022). Indeks kebahagiaan Provinsi Maluku Utara melampaui standar bahagia secara nasional, yakni 71,49 (BPS, 2021). Indeks kebahagiaan ini diukur dari kepuasan hidup,

afeksi, dan makna hidup. Realitas ini menggambarkan situasi yang paradoks, di satu sisi memiliki kebahagiaan yang tinggi, tetapi di sisi lainnya persoalan klasik seperti kemiskinan juga menjadi “lingkaran patologi sosial kronis” yang masih tidak terpecahkan. Salah satu potret tersebut tergambarkan dari Ternate Landmark (Gambar 8.10)



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.10** Potret anak jalanan tidur di dekat Ternate Landmark.

Miskin menjadi suatu realitas yang menggambarkan kondisi individu yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau bisa dikatakan individu yang tidak mampu dalam memenuhi standar penghidupan masyarakat pada umumnya (pangan, sandang, dan papan) (Kusuma, 2022; Pattinama, 2009; Prayoga, 2021; Yulasteriyani dkk., 2019). BPS Provinsi Maluku Utara mencatat, pada tahun 2021 terdapat 8.450 jiwa atau 3,55% penduduk miskin dari jumlah penduduk Kota Ternate yang mencapai 205.870 jiwa (BPS Provinsi Maluku Utara, t.t). Angka tersebut masih dinamis karena rentang waktu, disinyalir akan ada kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Ternate. Namun, fakta angka bisa jadi tidak menggambarkan realitas sosiologis yang terjadi. Angka kemiskinan yang tercatat bisa jadi tidak sinkron dengan realitas di masyarakat.

Fenomena tidak sinkronnya data memang sebuah tantangan di Indonesia. Bapak Taufik Hanafi (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,

dan Pengendalian Bappenas) mengatakan bahwa selama ini perbedaan data kerap terjadi, termasuk antarkementerian dan lembaga (Ristianto, 2019). Perbedaan data seperti ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di lapangan (Agustini, 2020; Chairuddin dkk., 2021).



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.11** Potret Kemiskinan Lansia Penjual Kue, Janda Beranak 10, Aisyah Alting, di Kasturian, Ternate Utara, Kota Ternate

Potret kemiskinan nampak dari seorang lansia yang menetap di Kasturian (Gambar 8.11). Realitas kehidupan dikisahkan sebagai warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejalan dengan pernyataan Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Bapak Aidil Adha, Regsosek diharapkan mampu memotret kondisi riil masyarakat yang akan menjadi jembatan atas terciptanya data masyarakat Indonesia yang valid dan dapat menjadi rujukan dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas “mencatat Indonesia” diharapkan menawarkan solusi paripurna persoalan perlindungan dan pemberdayaan sosial. Itulah sukma nilai positif kerja BPS yang menyebar serentak mendata Indonesia.

Regsosek menjadi upaya mengonfirmasi status kemiskinan seseorang dan menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengalaman saat COVID-19 melanda, banyak sekali kendala tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial dikarenakan data penerima bantuan yang tidak terintegrasi (Rahmansyah dkk., 2020). Menurut keterangan seorang warga yang di wawancara tim peneliti, di daerahnya pernah terjadi bantuan sosial tidak jatuh ke tangan warga yang membutuhkan, melainkan ke keluarga sekelompok oknum masyarakat yang sesungguhnya bertugas untuk mendistribusikan bantuan. Beliau mengungkapkan, “Selama ini yang mendapatkan bantuan hanya dari orang-orang mereka saja, yang semestinya tidak layak untuk menerima bantuan pemerintah”.

Informasi tersebut sungguh memprihatinkan. Regsosek diharapkan akan memperbaiki kondisi tersebut. Regsosek berfungsi sebagai candradimuka pembuka satu data kemiskinan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. PPL, PML, dan Koseka sebagai ujung tombak yang penting, mencatat dan mendata masyarakat yang selama ini tidak terdata atau selama ini tidak masuk dalam radar instansi pemerintah. Petugas pendata ini secara riil mendata seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, etnis, agama, status sosial, dan pekerjaan. Pendataan dilakukan sama rata tanpa pembedaan. Sinergitas antara petugas PPL dan PML, yang rata-rata bukan petugas organik atau biasa disebut sebagai mitra, tidak mengenal hambatan medan geografis untuk mendata seluruh masyarakat Indonesia. Selama responden adalah warga negara Indonesia, wajib untuk terdokumentasi secara riil dan sah dalam Regsosek.

Bapak Taufik Hanafi mengungkapkan, “Regsosek ini sendiri merupakan pendataan yang dilakukan oleh BPS untuk satu data Indonesia, yang kemudian data ini sebagai basis dalam menentukan kebijakan pemerintah ke depannya terutama terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat”. Harapan beliau agar di masa mendatang, data yang tidak sinkron dapat diatasi. Regsosek ini menjadi penawar ketidakpaduan data tadi menjadi satu data. Masyarakat Ternate telah terinternalisasi dalam benaknya memaknai Regsosek

sebagai *Badata yang tra tadata* (mendata yang tidak terdata). Seluruh masyarakat dapat terdata dan tidak ada yang terlewat. Aksi Regsosek menjadi nadi pembangunan melalui basis data yang sah dan riil. Regsosek merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat. Hadirnya negara menjangkau warga negara yang tidak dijangkau selama ini dalam pendataan.

## **D. Mengambil Nilai Positif dan Pembelajaran dari Petugas Garda Terdepan dalam Mendata**

Ternate menjadi sebuah pulau yang menarik untuk dijelajahi. Dinamika kultur adat dan kesultananannya menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan masyarakatnya. Penggalan emik pada proses Regsosek di Ternate mengukir sesuatu *mnemonic knowledge*, yang berarti menjadi suatu perangkat pengetahuan yang di dalamnya terpatri ingatan dari sebuah realitas (Lachmann, 2008; McCabe dkk., 2013; Pressley dkk., 2014). Regsosek menjadi suatu cara pemerintah hadir untuk mendata masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendata di lapangan, terlebih PPL dan PML di Ternate menghadapi hal yang tidak mudah. Tantangan berupa perpaduan fenomena masyarakat zaman sekarang dan masyarakat timur yang begitu kritis terhadap kedatangan orang asing terutama untuk mendata NIK, KTP, dan KK. Ada ketakutan dari masyarakat bahwa data akan disalahgunakan sehingga ada pandangan pesimis dari masyarakat dengan kegiatan sejenis pendataan ini. Petugas PPL dan PML sempat berkeluh kesah kepada peneliti bahwa ada masyarakat yang memandang survei ini hanya memberi harapan akan bantuan sehingga petugas survei dianggap secara tidak langsung telah *bafoya* ‘menipu’. Beberapa masyarakat kemudian menjadi resisten atau menolak menjadi responden.

Seorang PPL bernama Dian, berusia 22 tahun, menceritakan pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika melakukan pendataan di lapangan. Pengalaman menyenangkan adalah

ketika warga menerima Dian dengan baik, menawarkan minum dan penganan kue-kue. Dian mengaku paling senang ketika respondennya menerima petugas dengan ramah, membuka diri terhadap setiap pertanyaan, dan sigap memberikan fotokopi kartu keluarga. Namun demikian, Dian juga mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Salah satu respondennya pernah berkata “*ba data terus, baku data, foya saja*” ‘mendata terus, ambil data saja, bohong saja’. Dian mengatakan bahwa ia bersyukur telah mendapatkan pelatihan di kantor BPS untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Dian juga selalu berkomunikasi dengan PML dan Koseka jika ada responden yang sulit. Ia juga bersyukur sering kali ketua RT setempat siap membantu mengakses warga yang “sulit”.

Tantangan yang dihadapi petugas di lapangan memang tidak mudah. Selain tantangan geografis, tantangan sosial berupa penolakan seperti makian dan tingkah laku agresif kemarahan telah menjadi hal yang biasa dihadapi di lapangan. Kesulitan personal dan psikis (perasaan emosional pendata, kesulitan hidup pendata, dan lainnya) turut menjadi hal yang harus dilalui pendata di lapangan.

Sekelumit cerita nilai positif pendataan Regsosek di lapangan, yakni kegigihan dari petugas PPL yang pantang menyerah untuk memperoleh data. Pengusiran dan penolakan dari masyarakat setempat sering kali ditemui oleh petugas PPL (muncul pernyataan lisan masyarakat “Data terus...data terus....tapi bantuannya mana?”). Hal ini tidak menyurutkan niat PPL untuk terus mendata sampai data tersebut diperoleh dari masyarakat yang awalnya menolak sampai bisa memberikan data tersebut.

Dibalik itu semua, kegigihan pendata untuk tetap mendata sampai pelosok permukiman menjadi nilai positif yang dapat dimaknai. Berterus terang kepada masyarakat bahwa Regsosek ini bukanlah bantuan adalah kesulitan tersendiri dalam memahami masyarakat. Harapan masyarakat kepada pendataan sebagai saluran memberikan bantuan sering kali dihadapkan oleh petugas lapangan terutama PPL dan PML. Pertanyaan seperti “Bantuannya mana?” biasanya muncul dari tutur lisan keluarga yang terkategori miskin atau sangat miskin.

Hadirnya negara sangat diharapkan oleh masyarakat terkategori miskin. Ujian kesulitan ini menjadi hal yang sering dijumpai oleh PPL dan PML di Ternate.

Gestur tubuh, komunikasi lisan yang luwes, dan bahasa pengantar daerah setempat menjadi pembuka saluran interaksi untuk memberikan pemahaman pentingnya Regsosek bagi masyarakat. Cara pengantar komunikasi sederhana yang mudah dipahami dan selalu menjadi cara bagi PPL dan PML di Ternate menghadapi kendala demikian, yaitu disampaikan bahwa Regsosek ini dilakukan atas perintah presiden—disuruh bapa Presiden untuk pendataan—jadi mohon Bapak/Ibu bersedia untuk didata. Menyelipkan diksi “Presiden” dalam tiap tutur lisan dari PPL dan PML membuat masyarakat yang awalnya resisten menjadi permisif untuk menerima didata Regsosek.

BPS Kota Ternate menyadari betapa pentingnya mitra BPS seperti PPL dan PML sebagai garda etalase dalam mendata. Mitra BPS layaknya menjadi ujung tombak dalam pendataan. Data hasil Regsosek ini bagi PPL dan PML sama dengan nyawa. Data yang diperoleh dalam kuesioner tersebut disimpan rapi dalam map plastik. Map itu didekap erat, sekalipun hujan, data dalam map itu harus tetap kering diterima oleh PML. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara salah satu PPL Togolobe yang bertugas di Pulau Hiri (IH):

...Walau hujan deras, mendata tetap harus jalan. Kuesioner dalam map harus dijaga tidak boleh basah, badan dan kepala boleh basah, tetapi map tidak boleh rusak dan basah. Sekalipun jatuh ke laut, yang tetap harus di permukaan air laut adalah map data. Menjaga lembaran kuesioner Regsosek ini sama halnya dengan menjaga nyawa di badan...” (PPL, komunikasi pribadi, 5 November 2022)

Betapa pentingnya arti Regsosek ini bagi PPL dan PML di Ternate. Komitmen bekerja dan berjuang memperoleh data dengan kegigihan menjadi refleksi positif yang bisa diambil dalam proses penggalian emik ini. Sikap kegigihan dengan terus mendatangi responden yang berkali-kali menolak juga menjadi nilai positif. Sekalipun PPL diusir,

dihardik dan dimarahi dengan lisan masyarakat yang “tajam” tidak menyurutkan semangat dari PPL dan PML di lapangan. Petugas pendata (PPL dan PML) menganggap bahwa Regsosek ini ikhtiar perjuangan mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau untuk didata. Perjuangan melalui Regsosek ini menjadi bukti cara para PPL dan PML berkontribusi mengabdikan diri untuk negara.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang PPL dan PML di Kota Ternate, dapat digarisbawahi bahwa setidaknya terdapat dua jenis hambatan (*obstacle*) yang kerap ditemui di lapangan ketika pendataan dilakukan. Pertama, hambatan fisik yang disebabkan kondisi geografis Kota Ternate. Kedua, hambatan psikologis yang disebabkan karakteristik masyarakat.

### **1. Hambatan fisik**

- a. Tantangan utama menjadi PPL PML di Kota Ternate adalah ketika petugas bertugas mendata masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Gamalama. Ketika peneliti mengikuti PPL dan PML mendata dari pintu ke pintu di wilayah tersebut, peneliti dapat merasakan langsung sulitnya medan. Sering kali petugas harus berjalan di jalur dengan tingkat kemiringan hampir 45°. Di wilayah perbukitan tersebut jarak antarrumah juga cukup jauh sehingga membutuhkan stamina yang baik.
- b. Temperatur di Kota Ternate sangat tinggi, yaitu sekitar 39°. Seperti dituliskan di bagian awal bahwa di Ternate matahari sudah sangat terik sejak sekitar pukul 9 pagi. Temperatur menjadi lebih panas lagi di pulau-pulau kecil sekitar pulau Ternate. Peneliti berkesempatan mengunjungi Pulau Hiri yang berjarak 13.6 km dari Ternate. PPL dan PML menceritakan bahwa kondisi panas membuat petugas cepat kelelahan. PPL dan PML mengatasi hal tersebut dengan mendata pada malam hari.

### **2. Hambatan psikologis**

- a. Adanya kecurigaan masyarakat kepada PPL sehingga sering kali ditolak untuk didata. Kecurigaan ini kemungkinan karena

masyarakat khawatir bahwa orang yang datang adalah orang yang punya niatan jahat (kriminal). Hal ini tidak bisa lepas dari kasus-kasus kejahatan di mana pelaku kriminal menggunakan berbagai macam cara untuk masuk ke dalam rumah seseorang.

- b. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah pikiran masyarakat bahwa pendataan ini tidak memberikan manfaat. Masyarakat umumnya berpikir bahwa pendataan ini akan mempunyai *output* berupa pemberian bantuan. Masyarakat pernah didata sebelumnya dan tidak ada *output* bantuan dari pemerintah. Insiden ini kadang kala disebabkan data yang tidak sinkron di pemerintah, atau dikarenakan teknis pelaksanaan di lapangan yang tidak baik.
- c. Petugas lapangan mendapati sekelompok orang cenderung tidak mau diwawancara dan kalaupun di wawancara warga tidak akan terbuka. Di Kota Ternate kelompok masyarakat ini didapati di kelurahan Santiong Kota Ternate, di mana mayoritas merupakan pedagang.
- d. Di Kota Ternate, karakteristik kelompok masyarakat yang juga sulit untuk di wawancara adalah justru oknum masyarakat yang mempunyai status sosial tinggi. Kelompok ini adalah oknum pejabat negara di daerah. Dikatakan “oknum” karena memang tidak semua pejabat di daerah seperti itu. kelompok ini umumnya berprofesi sebagai aparatur sipil negara, tentara, polisi, kejaksaan.
- e. Hambatan selanjutnya adalah ketika responden yang menerima petugas PPL adalah penyandang disabilitas. PPL menemukan responden disabilitas rungu sehingga proses pendataan tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini maka petugas PPL datang di waktu yang sekiranya anggota keluarga lain dari penyandang disabilitas itu berada di rumah.
- f. Sering kali PPL dipandang oleh masyarakat sebagai petugas filantropi yang memberikan/menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat kemudian akan kecewa ketika mengetahui kegiatan ini hanya berupa pendataan.

Tantangan bukan hanya dihadapi para petugas di lapangan. Pejabat struktural BPS juga punya tantangan tersendiri. BPS Kota Ternate hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri sehingga masih menyewa gedung kepada pihak lain. Status gedung sewa mengakibatkan BPS Kota Ternate harus selalu bersiap jika sewa gedung tidak dilanjutkan oleh pemilik gedung. Artinya, BPS Kota Ternate akan memulai segala sesuatunya dari awal lagi, mulai dari memindahkan barang, mendekor ruangan, dan lain lain. Status “sewa” kantor BPS Kota Ternate yang kurang lebih 20 tahun tidak menyurutkan kinerja para aparatur organik dalam setiap agenda survei nasional. Persoalan kedudukan kantor yang hanya “menyewa” sama sekali tidak menurunkan semangat kerja terutama dalam menyukkseskan pendataan Regsosek ini.

BPS Kota Ternate, PPL dan PML menjadi mitra strategis yang menyiratkan cara kerja simbiosis mutualisme. Kerja sama ini saling menguntungkan antara BPS dan Mitra dalam mendata. Di satu sisi, rekrutmen mitra BPS berarti sebagai upaya dari pemerintah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sisi lain, menjadi mitra BPS sama halnya membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan walaupun tidak permanen. Setidaknya, kegiatan serupa Regsosek memberikan harapan bagi PPL dan PML beserta keluarganya agar asap dapur tetap mengepul.

## **E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan: Suksesor Pranata Struktural hingga Adat Kultural**

Regsosek merupakan sebuah survei yang rentang waktu pelaksanaannya relatif singkat dengan target yang sangat ambisius, yaitu mendata seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kegiatan Regsosek dipandang cukup sulit dilaksanakan. Namun, dengan sistem kerja di BPS, khususnya BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Kota Ternate yang sudah mapan, dengan sumber daya manusia yang telah berpengalaman, tersedianya dukungan teknologi yang

canggih, serta adanya dukungan pranata struktural sampai dengan pranata adat kultural maka pelaksanaan Regsosek di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berjalan dengan sangat baik. BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Kota Ternate menggunakan secara optimal potensi internal maupun potensi eksternal BPS. Cara yang dilakukan ialah memaksimalkan potensi internal dan melibatkan seluruh mitra BPS yang pernah bekerja untuk BPS. BPS juga menjangkau potensi eksternal berupa dukungan dari orang-orang elit daerah baik pejabat daerah maupun petinggi adat untuk mendukung pelaksanaan Regsosek. Oleh karena itu, bukan menjadi perkara yang sulit jika Regsosek mendapat dukungan, mulai dari ketua rukun tetangga (RT) sampai dengan Sultan Kerajaan Ternate. Strategi BPS di daerah menjadi sebuah langkah yang sangat efektif dan efisien.

Media turut memberi dukungan melalui pelbagai sumber daya (*resources*) yang ada. Kota Ternate mempunyai julukan “Kota dengan Seribu Masjid dan Seribu Benteng”, sebuah ungkapan yang menunjukkan secara hiperbolis bahwa di kota ini terdapat banyak sekali masjid. Masjid merupakan sarana media komunikasi ke masyarakat yang sangat mudah, murah, dan efisien. BPS Kota Ternate memaksimalkan potensi ini. Maka sosialisasi Regsosek kepada masyarakat di tingkat RT dan RW dilakukan menggunakan *speaker* di masjid-masjid merupakan cara yang tepat. Isi dari pengumuman berupa ajakan kepada masyarakat untuk membantu menyukseskan Regsosek dengan berpartisipasi dalam pendataan, dengan menyiapkan data kartu keluarga dan menerima dengan tangan terbuka petugas dari BPS yang akan datang ke setiap rumah untuk mendata.

Media komunikasi lain adalah penggunaan media sosial pada pelbagai platform, seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Dengan desain komunikasi visual yang menarik, penyebaran informasi tentang Regsosek di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini menjadi masif. BPS Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate juga telah menggunakan komunikasi massa kontemporer, yaitu menggunakan *influencer*, yaitu orang-orang yang berpengaruh. Berdasarkan observasi tim peneliti,

BPS membuat konten video sosialisasi Regsosek yang pematerinya adalah tokoh-tokoh seperti Kapolres, Dandim, Gubernur hingga Sultan Ternate.

BPS Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate juga mendistribusikan spanduk-spanduk untuk ditempatkan di beberapa titik lokasi yang strategis untuk mengedukasi warga tentang Regsosek. Berdasarkan pengamatan peneliti, BPS telah dengan sangat cerdas menggunakan bahasa lokal. Sebagai contoh, ketika tim peneliti tiba di Pulau Hiri disambut dengan spanduk dengan warna khas Regsosek yang dipasang persis di depan pelabuhan kecil. Orang-orang yang baru turun dari perahu dapat melihat dengan jelas spanduk tersebut (Gambar 8.12). Spanduk tersebut bertuliskan “Mari Torang bersama sukseskan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Kota Ternate”. Spanduk tersebut bertuliskan “Mari Torang bersama sukseskan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Kota Ternate”.



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.12** Spanduk untuk menyukseskan Regsosek terpasang di depan pelabuhan kecil Pulau Hiri.

## Implementasi di lapangan

Distribusi informasi digalakkan oleh pihak setingkat RT melalui jaringan Whatsapp (WA) grup RT. Ketua RT melalui grup WA menyebarkan informasi terkait Regsosek dengan melampirkan gambar lini masa Regsosek. Ketua RT juga mengimbau kerja sama warga untuk berkoordinasi jika nantinya tidak atau belum didata oleh petugas Regsosek di lapangan. Fakta di lapangan banyak ditemui warga yang masih sulit untuk ditemui. Setidaknya yang dilakukan perangkat RT dengan memberikan imbauan persuasif melalui corong toa masjid dan perluasan informasi ke grup WA merupakan bentuk dukungan nyata dalam pendataan Regsosek. Regsosek juga dimanfaatkan sebagian perangkat setingkat RT dalam memvalidasi informasi kemiskinan di wilayah lingkungannya. Banyak juga dari perangkat RT di wilayah Ternate, dengan pendataan Regsosek, malah “baru” mengetahui bahwa warganya ada yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin.

Perangkat RT menunjukkan bentuk dukungan yang bervariasi. Ada yang hanya sekedar memberikan informasi pemetaan awal warga miskin dan sangat miskin, tanpa mendampingi. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya kesibukan personal dari perangkat RT. Ada juga perangkat RT yang hanya menemani di beberapa rumah. Perangkat RT juga ada yang memberikan dukungan maksimal bagi pelaksanaan Regsosek dengan mendampingi PPL dan PML datang dari pintu ke pintu. PPL menceritakan bahwa ada ketua RT yang secara aktif berpartisipasi dalam pendampingan pendataan Regsosek, terutama di saat mendapatkan informasi dari PPL yang ditolak dan diusir oleh warga karena tidak ingin didata. Peran ketua RT sangat vital dalam memediasi komunikasi antara PPL dan warga dalam memahami pentingnya Regsosek. Seorang PPL menceritakan bantuan dari RT ketika ia mengalami penolakan oleh warga yang rumahnya sulit didatangi karena selain pagarnya tinggi, rumah juga dijaga anjing.

*Supporting* sistem sosial untuk pendataan Regsosek ini dilakukan dari dukungan dua pranata dalam masyarakat yaitu pranata struktural dan pranata kultural. Dukungan ini lebih kepada imbauan persuasif kepada masyarakat untuk menyukseskan “satu data” program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini melibatkan pelbagai instansi pemerintah dalam lingkup pranata struktural, seperti kepolisian setingkat polres, perangkat lurah, perangkat RT, petugas kecamatan, Komandan Kodim Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara, dan Sekda Kota Ternate. Dukungan pranata struktural dari pelbagai pemangku kepentingan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan legalitas dalam pendataan satu data Regsosek. Imbauan persuasif yang digaungkan perangkat pranata struktural, seperti ajakan Kapolres Kota Ternate, Andik Purnomo Sigit, untuk memberikan jawaban kepada petugas BPS yang sesuai dengan realitas profil warga, berupa “Mari sambut kedatangan petugas BPS. Dengan menjawab pertanyaan dengan baik. Agar mendapatkan data yang valid untuk kepentingan bersama...”

Tak kalah dengan pranata polisi, Kodim Kota Ternate, Letkol Inf. Jamet Nijo menyampaikan hal serupa, dengan lebih menekankan satu data melalui pemberian jawaban yang sejujurnya kepada petugas pendata Regsosek, yakni “Berikan jawaban sejujurnya pada petugas yang akan mengunjungi warga di seluruh kota Ternate. Mari sukseskan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.” Hal yang serupa juga disampaikan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, mengajak masyarakat di seluruh Maluku Utara untuk mendukung suksesnya pendataan awal Regsosek demi terwujudnya satu data untuk membangun negeri. Selain adanya *supporting* sistem sosial dari pranata struktural, tidak kalah penting adanya peran serta dukungan secara adat kultural dari Kesultanan Ternate terhadap Regsosek 2022 ini.

Titah dari Sultan Ternate yang mengajak masyarakatnya bersedia untuk didata Regsosek profilnya sebagai warga negara tanpa perlu ada ketakutan yang disembunyikan. Berikut titah simbolis yang perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Ternate, yakni

...Regsosek menjadi *database* yang bagus dan menjadi data yang penting bagi negara yang kelak di kemudian hari bisa kita mengetahui sebenarnya setiap warga negara anak bangsa ini profilnya seperti apa. Harapan semua masyarakat mau untuk mengisi apa adanya sesuai dengan seluruh item pertanyaan. Masyarakat tidak perlu takut dan tidak perlu sembunyikan. Sampaikan apa adanya, data ini sebenarnya hasilnya nanti bisa menunjukkan indikator-indikator penting.

Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah, menjadi perangkat sistem sosial dalam pranata adat kultural. Dukungan secara kultur dan adat dari Kesultanan Ternate menjadi simbol institusional terkultur dalam sistem sosial masyarakat Kota Ternate. Sultan Ternate menjadi simbol sakral kewibawaan yang dipatuhi oleh seluruh sistem masyarakatnya. Kepatuhan atas kesakralan titah Sultan Ternate menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Ternate. Tak pelak, Regsosek dengan dukungan Kesultanan menjadi titah simbolis ajakan kepada warga Ternate untuk menyukseskan satu data ini. Strategi pendekatan yang dilakukan BPS Kota Ternate dengan pelibatan unsur kultur adat dari pranata kesultanan merupakan jurus jitu mendukung kegiatan Regsosek melalui konsensus pemahaman masyarakat dalam kerangka sosio-historis. Hal ini sejalan dengan pandangan Nanuru (2011), bahwa suatu usaha penyertaan kerangka sosio-historis pelbagai perangkat dan pranata sosial dalam pencapaian konsensus komunikasi dengan menonjolkan aspek sistem kepercayaan atau corak kultur melalui entitas kesultanan sebagai kesadaran sejarah (*historical consciousness*) masyarakatnya.

## **F. *Life Story* Enumerator: Halang Rintang demi Data Ibu MTI (PML)**

Ibu MTI telah sejak lama membantu BPS Kota Ternate dengan menjadi petugas lapangan dan kinerjanya sangat baik. Tim peneliti berkesempatan mengikuti Ibu MTI mengunjungi rumah-rumah warga yang menurut petugas PPL sulit untuk ditembus, yaitu warga

yang selalu menolak untuk diwawancarai. Tim melihat sendiri dengan kemampuan komunikasi dan pendekatannya yang percaya diri mampu meluluhkan hati warga untuk didata oleh petugas PPL.

Ibu MTI bergabung dengan BPS Kota Ternate sejak 2019. Ibu MTI sesungguhnya berasal dari Sumatra. Beliau sangat memahami medan dan mampu berkomunikasi dengan warga menggunakan bahasa lokal. Beliau mendapatkan penghargaan Mitra Loyal dari BPS Kota Ternate pada 2021. Penghargaan ini layak diterima berkat konsistensi dan performa beliau. Ibu MTI kembali terpilih menjadi Mitra Hebat pada 2022. Itu adalah bentuk penghargaan dari BPS Kota Ternate kepada mitra-mitra yang berprestasi.

Pekerjaan sebagai mitra BPS Kota merupakan pekerjaan sampingan bagi Ibu MTI karena pekerjaan utamanya adalah sebagai guru Taman Kanak-Kanak sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di sebuah TK swasta di Kota Ternate. Ibu MTI rutin berpartisipasi sebagai mitra BPS sehingga anak-anaknya jika ditanyakan profesi ibunya, selalu mengatakan, “Ibu saya itu guru, pedagang, dan tukang kumpul data”. Berbagai pekerjaan dan gabungan penghasilan yang Ibu MTI dan suaminya hasilkan dirasakan belum cukup untuk menghidupi kedua anaknya, anak pertama kelas 3 SD, dan anak kedua kelas 1 SD. Dengan kondisi tersebut, beliau sangat bersyukur dan antusias mendapat kesempatan menjadi mitra BPS.

Ibu MTI menceritakan, sebelum pandemi COVID-19, usaha sang suami yang membuka jasa fotokopi mendapat penghasilan cukup baik. Namun, usaha tersebut menjadi tidak menghasilkan ketika pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini dikarenakan lokasi usaha dibuka di sekitar kampus Universitas Khairudin. Ketika pandemi seluruh kegiatan perkuliahan dilakukan secara *online*, mahasiswa tidak lagi pergi ke kampus. COVID-19 menjadi pukulan yang sangat hebat secara ekonomi bagi banyak masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga Ibu MTI. Namun, pasangan ini tidak kenal menyerah. Sang suami mencari nafkah tambahan dengan bekerja di sektor pertambangan dan Ibu MTI bersyukur mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru TK yang penghasilannya sebesar Rp1.600.000,00 per bulan.

Ibu MTI menceritakan titik terendah dalam hidupnya adalah ketika COVID-19 terjadi saat bulan Ramadan 2020. Dengan suara parau Ibu MTI menceritakan bahwa pada masa itu beliau melakukan apa saja usaha yang bisa dilakukan selama itu halal. Beliau memang menghadapi kesulitan, tetapi tetap merahasiakan kondisinya dari orang tuanya di Sumatra karena tidak ingin menjadi beban pikiran orang tuanya. Ibu MTI dan suami bertekad untuk menangani permasalahan secara mandiri. Ibu MTI bersyukur pekerjaannya sebagai guru TK membuatnya mempunyai jaringan perkenalan yang luas, yaitu dengan para orang tua murid. Salah satu orang tua murid mempunyai usaha jualan dan menawarkan Ibu MTI untuk menjadi *reseller*. Ibu MTI mencontohkan, untuk produk yang di luaran dijual Rp20.000, sang orang tua murid memberi harga Rp17.000,00 sehingga Ibu MTI bisa mengambil untung Rp3.000,00. Beliau sangat bersyukur pada bulan Ramadan 2020 dapat menghasilkan 500 ribu rupiah dari usaha menjadi *reseller*.

Ibu MTI menunjukkan rasa syukurnya bahwa di masa Ramadan selama sebulan penuh beliau tidak perlu memasak untuk berbuka puasa. Ibu MTI menceritakan, di bulan Ramadhan beliau sering kali mendapatkan makanan berbuka puasa dari orang tua murid ataupun dari orang yang membeli produknya. Saat itu, di bagian kanan kiri motornya selalu penuh dengan barang-barang jualannya.

Kegiatan survei ataupun sensus yang dilakukan oleh BPS menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh Ibu MTI dan rekan-rekan mitra BPS lainnya. Ibu MTI sangat berbahagia dapat berpartisipasi dalam kegiatan Regsosek kali ini. Ibu MTI merasa ikut berpartisipasi untuk bangsa Indonesia melalui perannya, di samping itu, beliau juga mendapatkan penghasilan tambahan. Ibu MTI menjelaskan beliau mendapatkan honor sebesar Rp4.500.000,00 untuk masa kerja selama sebulan. Selain Regsosek, Ibu MTI terlibat dalam Survei Biaya Hidup (SBH). SBH adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan (*urban area*) dan perdesaan (*rural area*) untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditi yang baru dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK).

Insentif yang beliau terima untuk survei SBH adalah per dokumen. PPL mendapatkan insentif Rp72.000,00/dokumen dan PML seperti Ibu MTI mendapat insentif sebesar Rp28.000,00/dokumen. Insentif PPL lebih besar karena PPL turun ke lapangan, sedangkan PML bertugas memeriksa hasil kerja PPL. PML akan memeriksa jika ada isian yang belum lengkap kemudian menghitung total data.

Prinsip kerja dari Ibu MTI adalah menjalankan amanah yang diberikan dan bekerja jujur. Ibu MTI menjalani multiperan, yakni fungsi domestik sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, fungsi publik sebagai guru, wakil kepala sekolah, dan PML Regsosek. Multiperan itu dilakukan oleh Ibu MTI tidak hanya untuk dapat menjaga kelangsungan hidup keluarganya, tetapi lebih untuk dapat mengabdikan diri demi negara melalui Regsosek. Ibu MTI mengaku berharap bisa lolos seleksi PNS, namun peruntungan belum berpihak pada ibu dua anak ini. Regsosek bagi Ibu MTI dirasa sebagai “pelepas dahaga” ambisi untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai PML mitra BPS.

## **IH (PPL)**

Kisah menarik lainnya ada Saudara IH, seorang PPL dari Kelurahan Togolobe di Pulau Hiri. Saudara IH telah mengabdikan sebagai honorer Kelurahan Togolobe selama 15 tahun. Penghasilan Rp900 ribu sebagai honorer kelurahan dirasa tidak cukup untuk biaya hidup yang sangat tinggi. Terlebih, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, merupakan kota ketiga dengan biaya hidup termahal di Indonesia (Aninditya, 2022). Selain menjadi honorer, Saudara IH juga berprofesi sebagai tukang ojek di Pulau Hiri. Pendapatan tambahannya dari kerja sebagai mitra BPS Kota Ternate dirasa cukup untuk dapat membiayai anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Ternate.

Penolakan dari masyarakat di Pulau Hiri awalnya sering kali ditemui ketika melakukan pendataan. Penolakan ini lebih kepada ketakutan adanya intrik berbau politis dalam pendataan Regsosek. Pendataan Regsosek di Pulau Hiri dengan menghimpun data berupa KK dianggap beberapa orang sebagai intrik untuk mendulang du-

kungan suara politik. Dukungan politik seperti apa yang dimaksud oleh masyarakat tidak begitu jelas. Hal ini dapat menjadi penanda adanya ketakutan akan penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan politik.

Saudara IH yang merupakan warga lokal Pulau Hiri paham betul cara menghadapi penolakan pendataan demikian. Pengetahuannya terkait karakter masyarakat Pulau Hiri dan komunikasi dengan pendekatan “hati ke hati” menjadi trik jitu bagi saudara IH untuk dapat meyakinkan warga Pulau Hiri. Saudara IH masih rela turun naik bukit untuk mendata warganya. Baginya, Regsosek tidak hanya persoalan mendata saja, tetapi ada sebuah harapan hidup bagi dia dan keluarganya maka tak pelak, setiap ada kegiatan yang melibatkan mitra BPS Kota Ternate, Saudara IH begitu bersyukur dapat diterima sebagai PPL yang bertugas di Pulau Hiri. Kegiatan yang melibatkan mitra BPS ternyata menyulitkan harapan penghidupan dari sebagian mitra. Bekerja dengan jujur dan tidak berbohong (*ba foya*) menjadi prinsip kerja yang dilakukan oleh saudara IH.

Saudara IH sadar bahwa usianya tidak lagi muda dan harus bersaing dengan tenaga-tenaga mitra yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat kompetisi dari dirinya. Sadar penguasaan teknologinya kurang, terlebih dalam mendata Regsosek ini harus dibekali pengetahuan teknologi informasi dengan aplikasi Wilkerstat, membuat saudara IH terus memperbarui pengetahuannya dengan belajar dari video berbagi di Soutube mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Halang rintang keterbatasan pengetahuan tidak menjadi penghalang bagi PPL, seperti saudara IH untuk berkontribusi dalam Regsosek ini.

### **Ibu WL (PML)**

Di Pulau Hiri, ada juga terselip kisah haru dari PML dari Kelurahan Mado. Ibu WL, merantau jauh dari Sulawesi Utara untuk mengadu nasib bersama suami di Ternate. Ibu WL ini juga sudah menjadi honorer Kelurahan Togolobe selama 17 tahun dengan penghasilan 900 ribu rupiah. Tulang punggung keluarga sudah dijalani Ibu WL

beberapa tahun terakhir sejak sang suami divonis sakit gagal ginjal dan harus menjalani pengobatan cuci darah. Suami yang tidak lagi bekerja, membuat Ibu WL harus berpikir keras untuk dapat menghidupi keluarganya. Pengharapan pada anak sulungnya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Ternate menjadi pelecut semangat bagi Ibu WL untuk bekerja lebih keras. Baginya, pendidikan adalah cara untuk bisa mengangkat nasib nelangsa keluarga, dibenaknya pun selalu tertanam bahwa anak tidak boleh merasakan nasib kesulitan hidup sepertinya dirinya sekarang. Apa pun ia kerjakan selama itu halal dan *ba foya* (tidak berbohong) termasuk menjadi PML mitra BPS Kota Ternate.

Pengalaman menarik dari Ibu WL dalam mendata, yaitu dengan mendatangi masyarakat pada waktu malam hari dan dengan suasana santai. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan pendataan. Kedekatan emosional dari PML Ibu WL turut juga membantu dalam mendata masyarakat di Pulau Hiri. Cenderung tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar Pulau Hiri ketika Ibu WL datang untuk mendata. Halang rintang dalam mendata yang dirasakan oleh Ibu WL adalah jaringan internet, terutama ketika melakukan *tagging* lokasi dan unggah foto rumah (wc, lantai, plafon, dan dinding). Harapannya, melalui Regsosek ini dapat terdata seluruh masyarakat terkategori miskin yang selama ini tidak terdata. Pendataan ini diharapkan sebagai saluran bagi masyarakat miskin yang tidak terdata memperoleh perlindungan dan bantuan sosial. Terkhusus para janda-janda yang selama ini tidak terdata dapat menerima bantuan.

## **G. Aisyah: *Life Story* sebagai Fokus Sumber Data**

Jauh dari bibir pantai dan gegap gempita Kota Ternate, pinggiran kota terselip sebuah kisah sedih dari seorang janda beranak sepuluh. Aisyah Alting (57 Tahun) namanya, hidup bersama anak dan cucunya dalam rumah berukuran  $5 \times 7 \text{ m}^2$ , beratap seng, dan berdindingkan tripleks. Hawa seng yang panas pada siang hari tidak menyurutkan

semangat Aisyah di usia senja dan fisik renta untuk membuat kue dan menjualnya di kios-kios pasar di Kota Ternate. Semenjak ditinggal suami, Aisyah Alting menjadi tulang punggung keluarga walaupun punggungnya renta. Aisyah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP, tetapi ternyata mampu menghidupi dan membesarkan anak seorang diri. Janda ini tidak pernah mengeluh. Seorang lansia harus bertatapan dengan kerasnya hidup di kaki Gunung Gamalama Kota Ternate.

Aisyah tidak mengetahui apapun terkait dengan Regsosek. Pendataan dalam benaknya hanya untuk mendapatkan bantuan. Pengharapan Regsosek ini memang kerap kali dianggap sebagai pendataan bantuan. Banyaknya masyarakat tidak mengetahui esensi dari Regsosek ini termasuk Aisyah Alting. Kedatangan untuk pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML di Kelurahan Kasturian terutama di rumah Aisyah Alting mengalami penolakan sampai tiga kali. Aisyah Alting merasa pendataan bukan perkara hal penting dan tidak terkait dengan perjuangannya untuk melanjutkan kehidupan. Aisyah hanya berpikir bagaimana bisa makan hari ini dan kue laku terjual.

Aisyah Alting juga cukup lantang menjawab kepemilikan aset yang dia miliki, padahal pertanyaan tersebut cukup “sensitif” sebagai rahasia keluarga. Dia menjawab dengan intonasi tinggi tidak memiliki tabungan di bank, tidak pernah melakukan peminjaman uang di bank dan koperasi, dan rumah yang ditinggali sekarang statusnya hanya milik saudara dari Almarhum suaminya. Aisyah juga tidak menutupi atau malu-malu dalam menjawab pertanyaan dari petugas PPL dan PML ketika ditanya mengenai aset yang dimiliki. Beliau memang seorang janda, tetapi masih memiliki tanah bersertifikat di RT 8. Dia pun juga menjawab secara terang-terangan terkait jumlah emas yang dimiliki, dia mengaku bahwa emas dimiliki tidak lebih dari 10 gram dan itu semua pemberian dari anak-anaknya.

Usia senja dan penglihatan yang buram tidak mengaburkan semangatnya untuk mencari nafkah. Aisyah Alting adalah secuil potret kemiskinan yang ada di Kota Ternate. Pengharapan pendataan dari Regsosek bisa menjadi pembuka jalannya untuk memperoleh bantuan



Keterangan: a. Aisyah Alting, b. Kondisi Rumah Aisyah Alting  
Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.13** Potret Kisah Salah Satu Responden Regsosek

dari pemerintah sebagai jaring pengaman hidupnya. Bantuan selama ini dirasa oleh Aisyah belum cukup untuk menghadapi keras dan tingginya biaya hidup di Ternate.

Keuntungan Rp20–30 ribu sehari menjadi pengharapan syukur dari janda sepuluh anak ini. Ketidakpastian pendapatan yang diperolehnya tidak menjadi batu sandungan untuk berpangku tangan kepada bantuan. Rasa syukur atas nikmat hidup dirasa sudah menjadi rezeki yang luar biasa bagi Aisyah di kala senja usia. Nelangsa penghidupan sebagai penjual kue tidak menyurutkan semangat. Tatapan sayu Aisyah Alting memberikan refleksi bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari aset harta, tetapi semangat hidup untuk terus berjuang sekalipun tulang hanya tinggal berbalut kulit.

Kisah hidup nelangsa dari kerasnya penghidupan di Kota Ternate juga tercatat secara emik di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate. Berada di selatan kaki Gunung Gamalama dan dekat dengan tempat peristirahatan Sultan Ternate ke-24, Sultan Babullah, menjadikan tempat ini cukup sakral menggambarkan realitas kemiskinan di peri perkotaan Ternate. Kontur tanah yang mendaki membuat model permukiman menjajaki tanah secara berundak. Akses jalan hanya dapat dilalui dengan kendaraan bermotor dan jalan kaki. Kendaraan bermotor pun ada yang tidak dapat mendaki

terjal karena kemiringan jalan mencapai 40–45°. Permukiman di sana juga tidak dialiri air PDAM sehingga untuk konsumsi air warga hanya mengandalkan berkah alam, yakni air hujan. Banyak sekali bak penampung air hujan berada di samping rumah warga. Hal ini menunjukkan ketergantungan warga pada air konsumsi tampungan air hujan. Jika kekeringan melanda panjang, warga sangat sulit mengakses air bersih.

Potret kemiskinan di Foramadiahi tecermin dari Keluarga Hidayat Sula. Rumah didiami oleh dua kepala keluarga (Hidayat Sula dan Amirrudin). Rumah yang berlantai hanya semen kasar dan banyak bolongan tanah ini memperlihatkan situasional aset papan dari keluarga ini. Saat penggalian emik bersama PPL dalam Regsosek, dilihat secara gamblang dari pancaindra bahwa keluarga ini masuk dalam kategori miskin. Penggalian empiris ini juga diperkuat dengan kondisi dalam rumah yang tidak memiliki kursi, gorden (jendela hanya ditutupi pilahan bambu), atap rumah yang banyak bolong, dinding yang hanya berbalut plester seadanya, dan kondisi MCK (mandi cuci kakus) yang sangat tidak layak dengan standar sanitasi kesehatan. Terlebih kondisi dapur yang bergabung dengan WC. Rumah hanya dialiri listrik sebesar 450 watt yang merupakan bantuan subsidi pemerintah. Barang elektronik yang terpantau sekilas juga tidak banyak di rumah tersebut. Barang yang terlihat hanya TV tabung berukuran 14 inci yang gambar dan warnanya pun sudah meredup.



Foto: Reza (2022)

**Gambar 8.14** Potret Senyum Kepolosan Nur Santi Hidayat Sula di Foramadiahi Ketika Pendataan

Keluarga ini (Hidayat Sula) hanya sebagai buruh tani pala dan cengkeh, sedangkan anaknya Amirrudin hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Perlindungan sosial semacam BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) tidak dimiliki oleh keluarga ini. Selama ini, keluarga tersebut belum tersentuh pendataan dari pihak aparat kelurahan dan RT setempat. Selain itu, keluarga ini sama sekali tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan bantuan sosial sembako. Hal ini menunjukkan bantuan pemerintah sebagai jaring pengaman bagi keluarga miskin belum menjangkau seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan. Nihilnya perlindungan sosial bagi keluarga ini membuat negara seakan absen bagi kehidupan keluarga ini.

Awalnya keluarga ini menolak untuk didata dan merasa pendataan semacam ini percuma dan sia-sia. Keluarga ini memandang bahwa mendata nyatanya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Keluarga ini merasa selalu didata, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan dan juga lebih sering melihat bantuan yang disalurkan pemerintah hanya ke oknum-oknum yang tidak layak untuk menerima bantuan. Keluarga ini menyampaikan apa adanya terkait kondisi keluarga. Pertanyaan sensitif bagi sebagian orang terkait kepemilikan aset, secara gamblang direspons dan dijawab. Nur Santi Hidayat menyampaikan apa adanya dan tidak menutup informasi apa pun dalam pendataan. Keluarga ini tidak memiliki emas, hanya memiliki satu kendaraan motor (masih kredit), tidak memiliki kulkas, bahan bakar untuk memasak hanya kayu dan minyak tanah. Keluarga ini juga memiliki aset nyata (*tangible asset*) selain rumah, yakni berupa lahan kebun yang lokasinya tidak jauh dari rumah.

Ibu empat orang anak ini juga bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Suami istri (Hidayat Sula dan Nur Santi Hidayat) ini hanya sekolah tidak sampai tamat SD. Anak pertama (Amiruddin) memiliki ijazah sarjana, tetapi hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Biaya keseharian konsumsi dua KK dalam satu rumah ini menghabiskan uang sekitar 100 ribu rupiah. Biaya tersebut bagi keluarga ini cukup untuk memberi makan delapan anggota keluarga dengan Rp12.500,00/

per orang dalam sehari. Harapan keluarga ini dari pendataan Regsosek adalah adanya perhatian pemerintah tidak hanya terkait bantuan tetapi juga jaring pengaman penghidupan (*social safety net*).

## H. Penutup: Regsosek Hadir demi Mencatat Indonesia

Regsosek hadir sebagai upaya pemerintah mendata secara menyeluruh. Kehadirannya diharapkan dapat mengatasi kesulitan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam keterpaduan dan transparansi data yang akan sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan, salah satunya dalam penyaluran bantuan tepat sasaran agar tidak menimbulkan efek kesenjangan antarmasyarakat penerima bantuan. Regsosek hadir sebagai penawar sekelumit kesahihan atas saling klaim “status kemiskinan”, dan juga sebagai “*counter* narasi data” atas klaim sepihak dari segelintir oknum yang hanya memanfaatkan informasi kurang valid atas orang-orang yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

Regsosek diharapkan sebagai penawar *obstacle* patologi sosial kronis dari permasalahan sosial klasik, seperti kemiskinan. Sejatinya, satu data Regsosek menjadi pendataan awal ihwal mulia dari pemerintah pusat dan daerah dalam mencatat Indonesia, menarasikan data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Penggalian data emik di Ternate dari Kasturian di kaki Gunung Gamalama hingga Pulau Hiri menjadi suatu perspektif diungkit dari pendalaman realitas riil pendampingan proses Regsosek. Sungguh subjektif jika penggalian ini dapat memberikan kedalaman emik dari proses Regsosek, lima hari efektif penggalian emik masih dirasa belum memadai dalam menguak realitas sosial. Usaha keras dalam penarasian realitas dari petugas Regsosek dalam mencacah angka, sepatutnya perlu juga ditumpahkan dalam gumpalan narasi teks berparagraf. Aspek yang terdokumentasi dari kuesioner Regsosek dengan penggalian emik ini dapat memberikan pandangan dari sisi yang berbeda membedah realitas masyarakat. Angka dapat dimanipulasi,

dan angka hanya sederet nominal yang dapat terjebak dalam hiperrealitas, sebagaimana meminjam premis Jean Baudrillard (1983 dalam Scott, 2007, pp. 14–17) menekankan hiperrealitas pada sesuatu yang dapat dilebih-lebihkan dari gejala realitas kepalsuan gambar, angka ataupun teks (Mantra, 2012; Piliang, 2015; Wardhana, 2022). Realitas tersebut dapat dibuat-buat dan dimanipulasi. Penggalan proses emik Regsosek inilah menjadi solusi dari penawar kepalsuan. Setidaknya, kelemahan ketidakpaduan dan ketidaksatuan data dapat terkuratif dari program satu data Regsosek.

Regsosek menjadi jawaban dari keluarga yang selama ini tidak terdata. Mendata bangsa dengan mencatat detail informasi profil setiap warga negara tanpa harus ada yang ditutupi atau disembunyikan. Satu ungkapan khas lokal Ternate yang tertangkap dari Pulau Hiri dan bisa dijadikan refleksi bagi seluruh perangkat pemangku kepentingan dan masyarakat luas, yakni mendata tidak boleh berbohong (*mandata ba foya*). Ungkapkan apa adanya, tidak boleh ditutupi, dan tidak ada yang boleh ditakuti, Regsosek bukti hadirnya negara di tengah masyarakat. Regsosek bukan penyalur bantuan sosial pemerintah, tetapi Regsosek awal keterbukaan mencatat satu data untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang termarginalkan dari gegap gempita pembangunan.

## Daftar Pustaka

- Agustini, P. (2020, 27 Januari). Peraturan presiden satu data Indonesia (SDI). *Kominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-satu-data-indonesia-sdi/>
- Andjarwati, D. E., & Kusumartono, F. X. H. (2019). Model dinamika pengembangan kota-kota di wilayah timur Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 11(1), 16–28. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/105250>
- Aninditya, H. R. (2022, 7 September). 13 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia, nomor 3 ada kota kaya rempah. *Inewsmaluku*. <https://maluku.inews.id/berita/kota-dengan-biaya-hidup-termahal-di-indonesia>.

- BPS. (2021). *Indeks kebahagiaan 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/ba1b0f03770569b5ac3ef58e/indeks-kebahagiaan-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2022). *Kecamatan Pulau Hiri dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate. <https://ternatekota.bps.go.id/publication/2022/09/26/5d1f2bd0ed4e7e8ba640d5f5/kecamatan-pulau-hiri-dalam-angka-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Wilkerstat BPS*. Playstore. [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bps.aan.wilkerstat&hl=en\\_US&gl=US&pli=1](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bps.aan.wilkerstat&hl=en_US&gl=US&pli=1)
- Bappeda Kota Ternate. (2016). *Monografi Kota Ternate*.
- BPS Kota Ternate. (2016). *Luas Pulau di Wilayah Kota Ternate*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate. <https://ternatekota.bps.go.id/statictable/2016/07/27/12/luas-pulau-di-wilayah-kota-ternate.html>
- BPS Kota Ternate. (2022, 1 September). *Halo, #SahabatData! Kabar baik untuk kita semua. Pendaftaran Petugas Pendataan REGSOSEK BPS KOTA TERNATE telah dibuka!* [Terlampir gambar][status update]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo?fbid=396884822569932&set=pcb.396884872569927>
- BPS Kota Ternate. (2022, 1 Oktober). *Haloha #SahabatData. Ada kabar baik nih, dibanding batunggu dia yg tra pasti-pasti* [Terlampir gambar] [status update]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=417671207157960&set=a.181635047428245>
- BPS Provinsi Maluku Utara. (t.t). *Proyeksi penduduk menurut Kabupaten/ Kota (jiwa) 2020–2022*. <https://malut.bps.go.id/indicator/12/55/1/proyeksi-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- Chairuddin, Suryana, N., & Wicaksono, H. (2021). Dukungan sistem informasi geografis untuk pendataan bantuan sosial berbasis asyarakat. Dalam Femmy, A. M. Yusuf, E. Tjandra, & S. Purwani (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 1(1), 147–158. STM IK Rosma. <https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/inotek/article/view/115>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (Fourth). Sage Publication.
- Djalil, A. G., Sela, R. L., & Tilaar, S. (2015). Evaluasi peruntukan lahan dan pemetaan zonasi tingkat risiko bencana letusan Gunung Api Gamalama di Kota Ternate (Studi kasus: Gunung Api Gamalama, Kota

- Ternate). *Spasial*, 2(3), 11–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9668>
- Harkantiningasih, N. (2014). Pengaruh kolonial di Nusantara. *KALPATARU*, 23(1), 67–80. <https://jurnal.arkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/51>
- Hasim, R., Abdullah, O. M. T., & Umar, S. R. H. (2019). Kebangkitan kesultanan Ternate pada era Reformasi 1998–2002. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(2), 69–103. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i2.11484>
- Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). (2021, 15 November). BPS. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>
- Iriyanto, N. (2010). *Benteng-benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate: Dalam peta pelayaran dan perdagangan Maluku Utara*. [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.
- Irsyadi, H. (2015). Legu Gam sebagai refleksi relasi antaretnik pada kemajemukan masyarakat Ternate. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.33387/jeh.v2i1.821>
- Jati, W. R. (2013). Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393–416. 10.21580/ws.21.2.251
- Jayaputra, A. (2017). Bantuan rehabilitasi rumah bagi warga miskin di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 154–170. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/652>
- Kota rempah jadi branding Ternate tingkatkan nilai ekonomi. (2022, 30 Agustus). *malut.kemenkumham*. <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi>
- Katherina, L. K. (2021, 24 September). Kota Ternate: Hiruk pikuk di kaki Gunung Gamalama. *Kependudukan*. <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/bencana-dan-perubahan-iklim/kota-ternate-hiruk-pikuk-di-kaki-gunung-gamalama/#:~:text=Pulau kecil dengan luas 162,BPS Kota Ternate%2C 2021>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Makam Sultan Babullah. <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/2016052300008/makam-sultan-babullah>
- Kusuma, R. (2022). Integrasi sosial masyarakat golongan miskin di perkotaan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 213–231. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.11643>
- Kusnandar, V. B. (2021, 7 September). Mayoritas Penduduk Maluku Utara Beragama Islam. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/mayoritas-penduduk-maluku-utara-beragama-islam>
- La Hade, M. U. H. S. D. J., Karman, A. S., & Abd Rahman, S. (2021). Ritual kololi kie pada masyarakat adat kesultanan Ternate. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, 8(1), 30–41. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v8i1.4076>
- Lachmann, R. (2008). Mnemonic and intertextual aspects of literature. Dalam A. Erll & A. Nunning, *Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook*, (pp. 301–310). Walter de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110207262>
- Mantra, D. (2012, 13 April). Hiper-realitas perekonomian nasional. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/02503211/index.html?page=all>
- McCabe, J. A., Osha, K. L., Roche, J. A., & Susser, J. A. (2013). Psychology students' knowledge and use of mnemonics. *Teaching of Psychology*, 40(3), 183–192. <https://doi.org/10.1177/0098628313487460>
- Nanuru, R. F. (2011). Ontologi Hibua Lamo dalam perspektif Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat*, 21(1), 31–47. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/4742>
- Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan kemiskinan dengan kearifan lokal (studi kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), 1–12. [www.jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/195](http://www.jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/195)
- Peta administrasi Kota Ternate. (2017). *Peta-kota*. [https://3.bp.blogspot.com/-QWlUygiI\\_4qw/WN\\_Pz5JIdQI/AAAAAAAAAEFc/kTuxYHBpJfMCu1Y0BafxJnTD9hZOuysywCLcB/s1600/peta%2Bkota%2BTernate.png](https://3.bp.blogspot.com/-QWlUygiI_4qw/WN_Pz5JIdQI/AAAAAAAAAEFc/kTuxYHBpJfMCu1Y0BafxJnTD9hZOuysywCLcB/s1600/peta%2Bkota%2BTernate.png)

- Piliang, Y. A. (2015). Uang dan hiper-realitas: Sirkulasi modal dan jagad raya moneter. *Extension Course Filsafat (ECF) Filsafat Uang*, 1. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/ECF/article/view/1987>
- Prayoga, R. A. (2021). Aktivasi modal sosial sebagai strategi menjaga kelangsungan hidup. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 115–128. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/2424>
- Pressley, M., Levin, J. R., & McDaniel, M. A. (2014). Remembering versus inferring what a word means: Mnemonic and contextual approaches. Dalam M. G. McKeown & M. E. Curtis (Ed.), *The nature of vocabulary acquisition* (107–127). Psychology Press.
- Qodi, Z. (2012). Involusi politik pemekaran, etnisitas, dan agama: Tantangan reformasi birokrasi kasus maluku utara. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(4), 217–226. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.217-226>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995>
- Ristiano, C. (2019, 24 Juli). Menurut Bappenas, ini penyebab kementerian dan lembaga pemerintah punya data yang berbeda-beda. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/17375821/menurut-bappenas-ini-penyebab-kementerian-dan-lembaga-pemerintah-punya-data>.
- Rozi, S. (2006). Merentas jalan panjang perdamaian: Negara & masyarakat dalam resolusi konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 77–89. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/423>
- Sadjim, U. M., Muhadjir, N., & Sudarsono, F. X. (2016). Revitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika dan kearifan lokal berbasis learning society pascakonflik sosial di Ternate. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 4(1), 79–91. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i1.7227>
- Sarihi, T. D., Malik, A. A. M., & Karongkong, H. H. (2022). Analisis pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota dan Sains*, 7(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/fraktal/article/view/39-50>

- Scott, J (Ed.). (2007). *Fifty key sociologists: The contemporary theorists*. Routledge.
- Setyaningrum, P. (2022, 10 Januari). 7 fakta Maluku Utara, provinsi paling bahagia di Indonesia yang jarang diketahui. *Kompas*. <https://makassar.kompas.com/read/2022/01/10/154143078/7-fakta-maluku-utara-provinsi-paling-bahagia-di-indonesia-yang-jarang?page=all>.
- Sherraden, M. (2006). *Aset untuk orang miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan*. Raja Grafindo Persada.
- Stefanus, & Koestoro, L. P. (2018). Benteng portugis Ujung Watu, Jepara: Hubungan kekuatan maritim nusantara. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 21(1), 80–99.
- Syahrain, R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi komunitas warga Sulawesi Selatan ke Kota Ternate. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH)*, 5(2), 83–100 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1808307>
- Umar, J. (2019). Identitas etnik dan dinamika politik lokal orang Makeang di Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(1), 354–363. <http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v10i1.1345>
- Wardhana, A. A. N. A. S. (2022). Hiperrealitas dalam permainan video daring: Simulasi, simulakra, dan hiperrealitas Garena Free Fire. *PERSPEKTIF*, 11(2), 607–614. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6011>
- Yulasteriyani, Y., Randi, & Hasbi, M. (2019). Kemiskinan masyarakat di Indonesia: Perspektif sosiologi Islam dan fenomenologi barat. *Intizar*, 25(2), 77–86. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/4463>